



Judul : Kasus pabrik uang di Makassar: Usut tuntas, tangkap pelaku dan jaringannya
Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Kasus Pabrik Uang Palsu Di Makassar

Usut Tuntas, Tangkap Pelaku & Jaringannya

Senayan menyoroti kasus pabrik uang palsu di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas dan menangkap seluruh pelaku dari jaringan uang palsu ini.

ANGGOTA Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, uang palsu (upal) yang sudah terlanjur beredar di masyarakat sudah sangat meresahkan. Pemerintah bersama Polda Sulsel dan Bank Indonesia (BI) mesti menarik seluruh uang palsu ini memikirkan ganti rugi buat korban penerima uang palsu.

"Ini kan sudah banyak beredar dan banyak ditemukan di pelosok-pelosok. Nah ini harus ditarik lalu dimusnahkan dan dipikirkan cara penggantian-nya. Apalagi, uang (palsu) ini dimiliki orang-orang kecil. Kasihan mereka telah menjadi korban peredaran uang palsu ini," tegas Rudianto saat dihubungi, Senin (23/12/2024).

Politisi Fraksi Nasdem ini juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk lebih masif lagi melakukan sosialisasi ke masyarakat agar bisa lebih membedakan antara uang asli dan uang palsu. Dia juga mendesak aparat penegak hukum segera menangkap AAS, pengusaha yang diduga menjadi otak kejahatan dan masih berstatus buron atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurutnya, keterangan AAS sangat penting untuk mengungkap siapa pun yang terlibat dalam peredaran uang palsu untuk dimintai pertanggungjawaban. Polda Sulsel, khususnya Polres Gowa, diminta segera mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya.

"Kami di DPR akan melakukan pengawasan sampai tuntas terhadap kasus ini. Dan kami berharap ada efek jera dengan memaknai pasal-pasal memberatkan karena dampaknya ini sudah sangat meresahkan," tegas ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024 ini.

Dia menegaskan, kasus ini tidak boleh dianggap remeh. Sebab potensi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan inflasi di masyarakat. Banyaknya uang beredar bisa berakibat pada stabilitas ekonomi negara. Apalagi uang palsu jaringan UIN Gowa ini presisinya luar biasa karena sangat mirip dengan uang asli.

"Bayangkan bisa masuk di ATM. Tidak terdeteksi. Ini berarti kejahatan canggih dan ironisnya, ini sudah berlangsung 14 tahun. Berarti sudah banyak uang yang beredar. Sekarang kita dorong polisi mengungkap itu setuntas-tuntasnya," tegasnya.

Rudianto mengaku, kasus

uang palsu dari jaringan UIN Gowa ini sangat mengejutkan dan jauh dari dugaan. Sebab pabrik uang palsu ini justru terjadi di lembaga pendidikan yang notabene merupakan lembaga yang seharusnya menjadi tempat untuk mencerdaskan anak bangsa, malah menjadi tempat terjadinya praktik kejahatan.

"Lembaga pendidikan yang seharusnya mencetak insan-insan berakhlak mulia dan berbudi pekerti, kini malah terlibat dalam praktik pembuatan uang palsu. Ini sangat memprihatinkan," ujarnya prihatin.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi XI DPR Tommy Kurniawan. Dia berharap BI segera melakukan operasi uang palsu yang sudah banyak beredar di masyarakat. Terlebih pabrik uang palsu itu sudah beroperasi sejak 14 tahun lalu. "Sudah cukup lama pabrik itu beroperasi. Berarti uang palsu sudah beredar luas di masyarakat," terangnya.

Anggota DPR dari Dapil Jawa

Barat V itu mengatakan, BI harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melacak ke mana saja uang beredar. Daerah mana saja yang selama ini menerima uang palsu. "Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mungkin sudah menyebut lokasi peredaran uang palsu," ujarnya.

Menurutnya, data dari polisi bisa digunakan BI untuk melakukan penelusuran dan operasi uang palsu. Melihat lamanya pabrik uang palsu beroperasi, tidak menutup kemungkinan uang palsu tersebut banyak digunakan masyarakat bertransaksi.

Di satu sisi, tidak semua masyarakat mengetahui bahwa uang tersebut palsu lantaran tidak melakukan pengecekan sehingga tidak mengetahui bahwa uang yang mereka gunakan adalah uang palsu.

"Jaringannya jelas sangat luas. Ini yang harus ditelusuri dan diusut tuntas. Yang paling dirugikan adalah masyarakat," pungkasnya. ■ KAL